

Sulawesi Barat Darurat Narkoba : Analisis Faktor Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi Barat

Asma Amin¹, Farhanuddin², Muh. Nasir Badu³, Darwis⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri faktor yang mempengaruhi tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa ada delapan faktor yang mempengaruhi antara lain : kondisi geografis; keterlibatan penegak hukum; kehidupan ekonomi penduduk yang membaik; kehidupan sosial dan gaya hidup yang permisif terhadap perubahan; perubahan pola peredaran narkoba ke wilayah pedesaan; kurang aktifnya pemerintah daerah dalam upaya P4GN; banyaknya migrasi di Sulawesi Barat; serta banyaknya narkoba substitusi.

Kata kunci : *Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Sulawesi Barat, Darurat narkoba.*

Abstract

This study aimed to explore the factor that influence the high number of drug abuse in west Sulawesi. By using a qualitative approach, this study shows that there are eight main contributing factors causing, i.e : geographical conditions; involvement of law enforcement officers; improved economic life of the population; social life and a permissive lifestyle of change; changing patterns of drug trafficking into rural areas; lack of active regional government in performing the P4GN; the number of migrant in West Sulawesi; as well as the substantial amount of cheap substitution drugs.

Keywords: *Drugs, Drugs Abuse, West Sulawesi, Narcotics Emergency.*

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Barat, sebagai salah satu provinsi muda¹ di Indonesia turut menjadi sasaran empuk dari kasus narkoba. Pada tahun 2014, Kepala BNNP Sulawesi Barat menyatakan bahwa Sulawesi Barat masuk sebagai wilayah darurat narkoba dengan tingkat prevalensi 2,09 persen dan menempati rangking 11 nasional dari 34 provinsi (Supratman dalam Putra :2015). Berdasarkan data dari BNN dan Putliskes UI, tingkat penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat mengalami siklus yang fluktuatif. Pada

tahun 2008, Sulawesi Barat menduduki peringkat ke 29 tingkat penyalahgunaan narkoba dari 33 provinsi dengan tingkat prevalensi sebesar 1, 43 persen. Dari total populasi 588.899 , ada 8.398 penyalahguna. Angka ini terus meningkat, dan menunjukkan arah negative. Pada tahun 2011, tingkat prevalensi meningkat mencapai 1,81 persen dan menempati urutan ke 16 dari 34 provinsi. Dari 873.288 populasi Sulawesi Barat, ada 15.824 penyalahguna pada tahun tersebut.

Di tahun 2014, Sulawesi Barat semakin mencatat rekor terburuk karena berada di rangking ke 11 tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan 2,09 persen, dimana dari 903. 800 populasi Sulawesi

Barat, ada 18.887 penyalahguna. Hal ini semakin menguatkan dan membawa Sulawesi Barat sebagai salah satu wilayah kategori darurat narkoba. Pada tahun 2015, Sulawesi Barat berhasil melakukan sedikit perbaikan ke arah positif, dimana tingkat prevalensi turun ke angka 1,90 persen dan menempati urutan ke 16 nasional, dimana dari 921.900 populasi, ada 17.539 penyalahguna (Tino, 2017a). Perbaikan ke arah positif semakin tampak, dimana pada tahun 2017, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat sebesar 1,70% dan menempati rangking 18 nasional. Dari data ini, 958.100 populasi di Sulawesi barat, ada 16.269 penyalahguna (Puslitkes UI-BNN, 2017).

Data di atas memberikan gambaran bahwa antara rentan waktu 2008 dan 2015 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba serta jumlah narkoba yang beredar di Sulawesi Barat selama rentan waktu tersebut. Kondisi ini begitu miris jika dilihat dengan kondisi wilayah yang masih merupakan provinsi baru di Pulau Sulawesi. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, posisi Sulawesi Barat yang termasuk kategori tinggi untuk tingkat penyalahgunaan narkoba, sangat berbanding terbalik dengan wilayah lain pada umumnya berada pada posisi teratas. Kecendrungan wilayah yang riskan akan penyalahgunaan narkoba yang tinggi adalah wilayah perkotaan dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi dan gaya hidup metropolis. Berbeda jauh dengan wilayah Sulawesi Barat yang masih dalam proses menuju atau penataan wilayah yang lebih baik sebagai sebuah provinsi muda (Amin dkk, 2017).

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat, menimbulkan pertanyaan: bagaimana hal tersebut dapat terjadi di wilayah dengan kondisi yang berbeda jauh dengan wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya atau Makassar yang seyogyanya telah mengalami siklus kehidupan sosial ekonomi yang mapan dan berbagai fasilitas atau wadah yang memungkinkan beredar dan tersedianya narkoba untuk dikonsumsi dengan mudah. Untuk itu, tulisan ini akan memaparkan analisis singkat tentang faktor yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat.

METODE DAN KERANGKA KONSEP

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan rinci dan lengkap terhadap topik penelitian (Wyse dalam Bakri, 2016: 17). Dalam penelitian ini, tujuan utama yang diharapkan adalah memberikan gambaran secara rinci alasan atau faktor perkembangan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat sehingga dikategorikan sebagai wilayah darurat narkoba.

Penelitian ini menekankan pengumpulan data melalui berbagai metode antara lain : (1) Metode wawancara (*interview*) dilakukan dengan pihak yang memiliki *authority* dalam topik penelitian ini. (2) Metode berbasis dokumen (*document-based research*) yang terdiri atas dokumen primer dan dokumen sekunder serta (3) Metode berbasis internet (*internet based research*). Hasil dari pengumpulan data ini selanjutnya diakumulasikan dan dianalisis

sehingga dapat diperoleh generalisasi terhadap data tersebut.

Selain itu, dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa konsep yang penting untuk memahami tulisan ini, antara lain :

a. Narkoba

Narkotika dan Zat Psikotropika pada dasarnya merupakan bagian dari kata NARKOBA yang lebih sering digunakan untuk menggambarkan berbagai obat-obatan terlarang karena sering disalahgunakan. Narkoba merupakan singkatan dari **N**arkotika, **P**sikotropika dan **B**ahan adiktif berbahaya lainnya. Dalam tulisan ini, fokus utama akan membahas narkotika dan psikotropika saja.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Contohnya :ekstasi dan sabu-sabu. Pada umumnya, psikotropika (golongan tertentu) digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).

b. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebih, secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial si pengguna (Martono & Joewana, 2005:1).

Secara lebih terperinci, Eleanora (2011:440) menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merujuk pada pemakaian narkoba di luar indikasi medic, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan social. Secara lebih luas, penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian² serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosial para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat (BNN-RI: 2009)

Jadi, penyalahgunaan narkoba merujuk pada sebuah aktifitas penggunaan obat-obatan atau zat-zat berbahaya yang tidak sesuai dengan prosedur dan fungsi medis yang sesungguhnya (diluar dari pelayanan medis)

atau tidak diperuntukkan untuk kegiatan penelitian sehingga menimbulkan dampak negative bagi fisik, emosi dan perilaku penggunanya.

c. Darurat Narkoba

Istilah darurat narkoba di Indonesia telah booming beberapa tahun lalu sebagai sebuah kesimpulan atas kondisi yang terjadi di Indonesia terkait dengan narkoba, mulai dari merebaknya produksi, peredaran, hingga konsumsi narkoba di berbagai lapisan masyarakat serta masuknya berbagai jenis narkoba terutama jenis shabu ke Indonesia dari Negara lain hingga mencapai ratusan ton, ditambah lagi kasus peredaran dan produksi narkoba yang ternyata di kendalikan dari dalam penjara. Istilah ini kemudian familiar dengan “Indonesia Darurat Narkoba”.

Istilah Indonesia Darurat Narkoba menjadi gambaran umum yang berlaku di seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat ancaman yang berbeda-beda. Di Sulawesi Barat sendiri, penggunaan istilah Sulawesi Barat Darurat Narkoba lebih mengacu pada kondisi peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat yang pada tahun 2014 menempati rangking ke 11 dari 34 provinsi di Indonesia dengan persentasi 2,09 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor perkembangan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi barat

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab perkembangan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat. Faktor yang kami ungkapkan dalam tulisan ini ditinjau dari aspek sosial-ekonomi dan geografis atau

kondisi umum yang ada di Sulawesi Barat dan terlepas dari faktor pribadi si penyalahguna.

Kondisi geografis: pintu masuk utama peredaran narkoba

Dari analisis kondisi geografis wilayah Sulawesi Barat, ada beberapa kondisi yang mendukung masuk dan beredarnya narkoba di Sulawesi Barat. *Pertama*, garis pantai yang panjang dilengkapi dengan banyaknya pelabuhan-pelabuhan antara lain Pelabuhan Tanjung Bakau dan Bone Manjeng di Kabupaten Mamuju Utara, Pelabuhan Bodong-bodong di Mamuju Tengah, Pelabuhan TPI, Ferry dan Belang-belang di Mamuju, pelabuhan Palipi di Majene serta puluhan pelabuhan rakyat (Ditpolair Polda Sulbar, 2017). Pelabuhan-pelabuhan ini berpotensi menjadi pintu masuk narkoba di Sulawesi Barat. Permasalahannya semakin lengkap karena kondisi pelabuhan yang tidak dilengkapi detektor untuk mendeteksi narkoba yang mungkin dibawah oleh penumpang. Pemeriksaan manual akan sangat menghabiskan waktu dan tenaga. Selain kapal penumpang, penggunaan kapal-kapal nelayan penangkap ikan disinyalir turut mengambil peran penting dalam masuknya narkoba di Sulawesi Barat. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang tidak lagi beroperasi serta pelabuhan-pelabuhan tikus memberikan peluang besar bagi para pengedar. Menurut kepala BNNP Sulawesi Barat (Sutarya, 2017b) bahwa 99 persen peredaran narkoba melalui jalur laut.

Tantangan yang lebih besar bagi Sulawesi Barat semakin nampak dengan dibukanya rute baru pelayaran dari pelabuhan Tanjung Sipolo Polman (Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat) ke Pelabuhan Lahad Datu Sahab Malaysia pada Rabu, 31 Januari

2018 lalu (Rohedi: 2018). Ditinjau dari aspek positif, hal ini akan membantu masyarakat terutama bagi mereka yang sering berkunjung ke Malaysia serta membuka peluang kerjasama internasional yang lebih luas seperti perdagangan dan ketenagakerjaan (Tulipas:2018). Jadi masyarakat yang biasanya berkunjung ke Malaysia, tidak perlu lagi transit terlebih dahulu di Nunukan (Kalimantan). Namun, dibalik kemudahan tersebut, seperti layaknya kemudahan perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, maka bukan tidak mungkin terjadi perpindahan (distribusi) narkoba yang lebih mudah bagi para bandar atau pengedar. Apalagi jika ditelusuri, ada beberapa jalur yang menjadi pintu utama masuknya narkoba di Sulawesi Barat. *Pertama*, Narkoba ini secara langsung berasal Malaysia. Kasus yang terungkap pada tahun 2016 lalu, menunjukkan adanya distribusi langsung narkoba dari Malaysia ke Sulawesi Barat, meski bukan dalam jumlah yang sangat besar, namun harus tetap mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. 22 Juni 2017, Polair Polda SulSel berkoordinasi dengan Kapolres Majene, Sulawesi Barat berhasil menangkap Silahuddin (warga Majene) di Hotel Davina, Majene yang membawa 966, 1471 gram sabu yang berasal dari Tawau Malaysia. Menurut penuturan Kapolda Sules Irjen Muktiono, bahwa sabu yang diamankan ini kualitas paling bagus di Tawau, Malaysia. 1 gram dapat dikonsumsi oleh 10 orang. Jadi dalam 1 kg sabu bisa merusak 10 ribu orang (Muktiono dalam Abdurrahman, 2017). *Kedua*, Disitribusi tidak langsung, melalui plot Pare-Pare (pelabuhan Nusantara) dan Plot Makassar. Melalui Plot pare-pare umumnya narkoba tersebut juga berasal dari Tawau,

wilayah bagian Sabah, Malaysia Timur. Kemudian diselundupkan ke Kalimantan, biasanya melalui nunukan yang terkenal sebagai jalur sutra narkoba. Hal ini tidak mengherankan karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Dari nunukan, narkoba ini akan didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk ke Makassar, Pare-Pare (Sulawesi Selatan) serta ke Sulawesi Barat. Untuk masuk ke Sulawesi Barat, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi berputar dan pola estafet. Jalur berputar digunakan dalam rangka memperluas jaringan peredaran. Jadi pola peredarannya : Malaysia (Tawau)-Kalimantan (nunukan)-Sulawesi Selatan (Pare-Pare)-Sidrap-Pindrang-Sulawesi Barat. Sering pula dari Pare-Pare secara langsung diedarkan ke wilayah Sulbar. Sedangkan jika melalui plot Makassar (narkoba dari Makassar memiliki jangkauan yang lebih luas, baik asal/sumber maupun pasarannya), maka selanjutnya dan umumnya akan melalui jalur darat kemudian didistribusikan ke berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kasus terbaru yang terjadi pada Senin, 9 April 2018, Polda Sulbar berhasil meringkus dua tersangka yang membawa 1 kg sabu untuk diedarkan di Sulawesi Tengah (Palu) yang berasal dari Kalimantan. Hal ini berarti, bahwa Sulawesi Barat juga telah dijadikan pintu masuk dan transit peredaran narkoba.

Kedua, kondisi geografis lainnya yang mendukung masalah penyalahgunaan narkoba adalah banyaknya wilayah pelosok yang minim kontrol petugas, beberapa wilayah pedesaan cukup jauh dari jangkauan Polsek ataupun Polres. Beberapa wilayah di Sulawesi Barat, bahkan tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua dan kendaraan roda

empat, namun harus bergantung banyak pada kuda (bendi) atau dengan satu-satunya akses berjalan kaki. Hal ini membuat aksi para pelaku semakin gencar karena minimnya kontrol petugas untuk beberapa wilayah pedesaan. Di kabupaten Polewali misalnya, ditemukan adanya salah satu daerah yang dijadikan sebagai pusat pemaketan, yaitu menjadikan paket besar menjadi paket-paket atau bungkus kecil untuk selanjutnya siap diedarkan ke konsumen. Kabupaten Polewali bahkan menduduki peringkat pertama tingkat penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi Barat dan kemudian disusul oleh Mamuju (Ahmad, 2017).

Aparat penegak hukum dan pelanggaran atas narkoba

Di wilayah Sulawesi Barat, kondisi ini juga menjadi salah satu kendala dalam mengatasi masalah narkoba. Keterlibatan petugas menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh Pemerintah Sulawesi Barat. Keterlibatan oknum aparat penegak hukum menjadi masalah yang krusial. Menurut data yang dilansir oleh MNC Media, bahwa pada tahun 2016, terdapat puluhan oknum aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. November 2016, menurut pengakuan Kapolres Mamuju Utara AKBP Yanwar Widyanto, terdapat 21 bawahannya positif menggunakan narkoba. Sedangkan pada November 2016, berdasarkan tes urin yang dilaksanakan oleh Polda Sulbar untuk resort Mamuju, terdapat 40 orang aparat resort Mamuju yang positif menggunakan Narkoba. Pada 2 Mei 2017, dilakukan penangkapan terhadap 4 oknum aparat dari Polda Sulbar yang melakukan pesta sabu bersama 4 warga sipil lainnya. Mirisnya, bahwa para oknum

aparat tidak hanya berperan sebagai pemakai, namun juga sebagai bandar dan pengedar kelas kakap (RCTI Sulbar, 2017).

Pertumbuhan ekonomi penduduk vs penyalahgunaan narkoba

Pada tahun 2014, BPS melansir data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat sebesar 8,73% dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (BPS: 2014). Pada triwulan pertama tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat kembali mengalami peningkatan mencapai 7,38 persen. Dari data tersebut, peningkatan sektor pertanian sebesar 3,24 persen berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat (Jokowi dalam PresidenRI.go.id: 2017). Sektor pertanian yang utama adalah produktivitas padi, kakao dan sawit yang mengalami peningkatan (Angkoro dalam Makassar.tribunnews.com: 2017). Meskipun mengalami fluktuasi tingkat pertumbuhan ekonomi, namun data-data di atas secara umum menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sebagai sebuah provinsi yang masih mudah mengalami peningkatan yang signifikan dan tergolong tinggi apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar di atas 5%.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat secara tidak langsung menunjukkan arah perbaikan ekonomi penduduk secara umum. Terutama di sektor produktivitas padi, kakao dan sawit. Hal ini selanjutnya dianggap sebagai salah satu faktor yang mendukung tingkat penyalahgunaan narkoba di Sulawesi barat. Kepala BNNP Sulawesi Barat

(Sutarya:2017a) menyatakan bahwa kondisi ekonomi penduduk di Sulawesi Barat mengalami perbaikan yang signifikan, terutama petani-petani kakao dan sawit. Kalau kita menyusuri arah Mamuju ke Mamuju Tengah dan Utara, sebagian besar adalah sawit, rata-rata penduduk juga sudah memiliki minimal satu kendaraan beroda dua (motor), belum lagi jika sawit-sawit mereka mencapai puluhan hektar. Para petani kebun sawit sebagian besar mengalami tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Para petani yang memiliki uang, dijadikan sebagai lahan strategis para pedagang, apalagi jika para petani minim pengetahuan akan bahaya dan jenis narkoba, para pedagang dapat menjadikan dalih obat kuat, sehingga para petani membeli karena ketersediaan uang, tergiur dan akhirnya ketergantungan. Belum lagi, jika para masyarakat atau petani memiliki uang namun tidak tahu harus menggunakan uang tersebut untuk apa, karena kurangnya wadah seperti mall, supermarket yang bisa mengundang atau menggoda pengeluaran masyarakat di wilayah-wilayah pelosok perkebunan.

Kehidupan sosial dan gaya hidup yang permisif terhadap perubahan

Ditinjau dari aspek sosial dan gaya hidup, sebagian masyarakat Sulawesi Barat telah mengalami pergeseran nilai dan lebih permisif terhadap perubahan dan keadaan baru (Farhanuddin: 2018). Di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat seperti Polewali Mandar, Majene dan Mamuju, telah menjamur cafe, minimarket, resto, penginapan, warkop serta tempat-tempat karaoke yang mulai semakin familiar di masyarakat. Bahkan di wilayah Mamuju saat

ini telah dibangun mall di pusat kota. Gaya hidup dan sosial masyarakat seolah memberikan indikasi mengarah pada model-model kehidupan sosial masyarakat wilayah-wilayah perkotaan modern seperti Makassar dan pulau Jawa. Kecendrungan untuk mengadopsi gaya dari luar bukan hanya dapat memberikan nilai positif namun juga memberikan pengaruh negative, termasuk di antaranya penyalahgunaan narkoba. Cafe, resto ataupun warkop ini bisa menjadi salah satu wadah tongkrongan bagi para pedagang untuk mencari konsumen, mempengaruhi konsumen baru dan bertransaksi atau mungkin mengkonsumsinya (pesta narkoba).

Perluasan pasar narkoba ke wilayah pedesaan

Gencarnya gerakan memerangi narkoba dalam berbagai level, telah memberikan ancaman pada pasar narkoba yang umumnya terdapat di kota-kota besar. Posisi para bandar dan pedagang yang terancam, menjadikan mereka merubah pola peredaran narkoba. Para pedagang mulai mencari pasar baru yang potensial dan aman untuk dijadikan sebagai perluasan wilayah peredaran, salah satunya adalah Sulawesi Barat. Berbagai kondisi internal lainnya, baik dari segi geografis, sosial budaya dan perekonomian masyarakat menjadi faktor pendukung kondisi tersebut (Amin & Farhanuddin, 2017).

Kurang aktifnya pemerintah daerah kabupaten dalam upaya P4GN

Untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan narkoba, peran aktif seluruh elemen menjadi salah satu kunci utama. Tersedianya lembaga khusus Narkotika atau

Kepolisian, seringkali mendiskriminasi pola pikir masyarakat pada umumnya untuk memberikan beban sepenuhnya kepada mereka dalam masalah narkoba. Padahal secara jelas di atur dalam Undang-Undang, adanya keterlibatan dari semua element, baik individu, masyarakat, dan termasuk pemerintah daerah untuk ikut andil dalam mengatasi persoalan penyalahgunaan narkoba.

Kurang aktifnya pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Barat, menjadi salah satu bagian tak terpisahkan atas tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat. Beberapa hal yang menjadi tolak ukur kurang aktifnya pemerintah daerah dalam mendukung upaya P4GN anatar lain (Tino, 2018):

1. Tidak tersedianya anggaran di setiap pemerintah daerah terkait upaya P4GN di daerah masing-masing
2. Pemerintah daerah masih menggantungkan upaya P4GN di daerahnya kepada pihak lain. Misalnya tes urine terhadap para pegawai yang membebankan pembiayaannya hanya kepada BNN.
3. Tidak pro aktifnya pemerintah daerah dalam mengusulkan lembaga vertikal BNN Kabupaten. Sejauh ini, di wilayah Sulawesi Barat hanya ada satu BNNK yaitu di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
4. Tidak tersedianya fasilitas layanan rehabilitasi oleh Pemda.

Migrasi penduduk vs migrasi narkoba

Sebagai provinsi baru, Sulawesi Barat menjadi salah satu tujuan perantauan dan mencari pekerjaan dari berbagai daerah. Beberapa diantaranya masuk ke Sulawesi Barat untuk membuka lahan-lahan baru

pertanian, terutama kelapa sawit, menjadi buruh tani, berdagang, menikah atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan data dari BPS (BPS: 2010): bahwa angka migran risen³ di Sulawesi barat mencapai 5,1 %, bahkan untuk angka migran risen seumur hidup di Sulawesi Barat mencapai angka 21, 9 persen. Sulawesi Barat bukan hanya dihadapkan pada persoalan migrasi yang masuk, namun juga banyaknya warga Sulawesi Barat yang keluar daerah atau beremigrasi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau bahkan menjadi TKI (pekerja migran) di luar negeri.

Proses migrasi ini disinyalir menjadi jalan bagi terjadinya peredaran narkoba dan menyumbang angka atas tingginya prevalensi narkoba di Sulawesi Barat. Hal ini dapat ditinjau dari dua hal. Pertama, orang-orang yang bermigrasi ke Sulawesi Barat, kemungkinan saja adalah orang yang telah mengkonsumsi narkoba atau justru adalah pengedar, yang kemudian melakukan aktivitasnya serta melebarkan peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Barat. Kedua, warga Sulawesi Barat yang merantau ke luar, selama dalam perantauan terpengaruh dan melakukan kegiatan terkait narkoba, baik sebagai konsumen maupun pengedar. Pada saat kembali ke kampung halaman, oknum tersebut dapat memengaruhi orang lain di sekitarnya untuk mengkonsumsi bahkan mengedarkan narkoba. Besarnya keuntungan yang didapatkan dari transaksi narkoba, membuat peredaran narkoba ini sebagai salah satu pilihan pekerjaan utama bagi para pengedar.

Narkoba substitusi: Murah meriah, melimpah ruah

Mahalnya harga berbagai jenis narkotika dan psikotropika, mengakibatkan munculnya narkoba substitusi yang murah meriah dan melimpah. Narkoba substitusi ini sebenarnya jenis obat-obatan yang tersedia legal di apotik atau toko-toko karena umumnya memang digunakan untuk pengobatan, misalnya komix dan dextro untuk obat batuk, Boje (Trihexiphenyl) untuk penyakit Parkinson, dan berbagai jenis daftar obat G lainnya. Belakangan kemudian, berbagai aksi yang tidak sewajarnya dalam konsumsi obat-obatan ini semakin meningkat. Hal tersebut hanya untuk mendapatkan efek fly atau memabukkan yang tidak dapat diperoleh karena kekurangan uang untuk membeli shabu atau sejenisnya yang tergolong mahal atau sebagai substitusi dari narkoba yang mahal. Konsumen menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai kaedah kesehatan, misalnya mencampurkan komix dan minuman kratindaeng (koteng). Menggunakan PCC, Dextro atau berbagai obat daftar G dengan jumlah yang banyak sehingga over dosis dan menimbulkan efek memabukkan, terus berbicara atau tidak sadar.

KESIMPULAN

Masalah narkotika dan psikotropika di Sulawesi Barat telah mencapai titik rawan dan sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait dan saling mendukung, diantaranya : kondisi geografis; keterlibatan penegak hukum; kehidupan ekonomi penduduk yang membaik; kehidupan sosial dan gaya hidup yang permisif terhadap perubahan; perluasan peredaran narkoba ke wilayah pedesaan; kurang aktifnya

pemerintah daerah dalam upaya P4GN; banyaknya migrasi (masuk dan keluar) di Sulawesi Barat; serta banyaknya narkoba substitusi yang murah meriah. Untuk itu, diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

REFERENSI

- [1] Amin, Asma dkk. (2017). *Dari Asia Tenggara Hingga Sulawesi Barat: Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi Barat*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat bagi Dosen. 3-5 November 2017 di Gammara Hotel, Makassar.
- [2] Angkoro, Dadal. (2017). *Segini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2017*. Dapat diakses di <http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2017/12/30/segini-pertumbuhan-ekonomi-sulawesi-barat-tahun-2017?espv=1>. Diakses pada tanggal 10 April 2018.
- [3] BNN-RI (2009). *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta. Dapat diakses melalui <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>.
- [4] BPS. 2010. *Wilayah Sulawesi Barat*. Dapat diakses di <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=76&wilayah=Sulawesi-Barat>. Diakses pada tanggal 5 April 2018.
- [5] Ditpolair Polda Sulbar 2017. *Pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Barat*, dalam <https://www.google.com/amp/www.ditpolairp>

oldasulbar.com/2017/02/27/Pelabuhan-pelabuhan-di-sulawesi-barat/amp/?espv=1. diakses 21 Agustus 2017.

[6] Eleanora, Farnisca Novita. (2011). *Bahaya penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, Suatu Tinjauan Teoritis*. Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011. Hal 439-452.

[7] Hawari, Dadang. (1991). *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta : BPFKUL.

[8] Martono, Lydia Harlina & Joewana, Satya. 2015. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta : Balai Pustaka.

[9] Rohedy, Harno Nanda dalam RatyatkuNews. (2018). *Pelabuhan Tanjung Silopo Polman Resmi Beroperasi* dalam <http://news.rakyatku.com/read/85265/2018/02/01/pelabuhan-tanjung-silopo-polman-resmi-beroperasi>, diakses pada tanggal 8 April 2018.

[10] Supratman dalam Putra, Yudha Manggala P. 2015. *Sulbar Masuk Kategori Wilayah Darurat Narkoba* dalam http://m.republika.co.id/amp_version/np64new. Diakses pada tanggal 1 April 2018.

[11] Sutarya, Dedi. (2017b). *17 Persen penduduk Sulbar teridentifikasi penyalahgunaan narkoba*, dalam <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/03/04/17-persen-penduduk-sulbar-teridentifikasi-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses 30 juli 2017.

[12] Jokowi dalam PresidenRI.go.id. 2017. *Apresiasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat* dalam <http://presidenri.go.id/berita-aktual/apresiasi->

untuk-pertumbuhan-ekonomi-sulawesi-barat.html. Diakses pada tanggal 10 april 2018.

[13] Tino, 2017a. *Materi Penyuluhan P4GN BNNP Sulawesi Barat*, diolah dari laporan Putliskes UI-BNN 2008-2015.

[14] Tino, 2018b. *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Disampaikan dalam Workshop Pengembangan Kapasitas Bidang P4GN di Lingkungan Pendidikan Kab. Majene pada Kamis, 12 April 2018 di Villa Bogor, Majene, Sulawesi Barat.

[15] Tulipas, Madamme Juvi S dalam PolewaliTerkini.net. (2018). *Wow...! Jalur transfor Laut Rute Internasional Polman-Malaysia diresmikan...* . Dapat diakses di <http://www.polewaliterkini.net/2018/01/wow-jalur-transfor-laut-rute.html>, diakses pada 8 April 2018.

[16] Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

[17] Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[18] Wawancara langsung dengan Kombes Dedi Sutarya, Kepala BNNP Sulawesi Barat di Kantor BNN Sulawesi Barat, Mamuju, tanggal 28 Agustus 2017.

[19] Wawancara dengan Tino S.Psi [WhatsApp], Penyuluh Narkoba Ahli Pertama bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Sulawesi Barat, tanggal 8 Oktober 2017

[20] Wawancara langsung dengan Tino S.Psi. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

(P2M) BNNP Sulawesi Barat, tanggal 29 Maret 2018.

[21] Wawancara dengan Tino S.Psi [WhatsApp], Penyuluh Narkoba Ahli Pertama bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Sulawesi Barat, tanggal 13 April 2018.

[22] Wawancara dengan Farhanuddin [whatsApp], Wartawan Metro Tv dan Dosen ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, tanggal 11 April 2018.

[23] Wise Susan E dalam Bakri, Umar Suryadi. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.